



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah terjadi perubahan struktur, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-268 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2011-2016;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 84 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya SKPD adalah organisasi/lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Rokan Hulu;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu;
8. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
9. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama ini adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing perangkat daerah dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah dan unit kerja mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala perangkat daerah dan unit kerja mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat Rokan Hulu.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu diberi tugas untuk :

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ;

- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Rokan Hulu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diharuskan membuat penetapan Indikator Kinerja Utama.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
pada tanggal Desember 2012

 **BUPATI ROKAN HULU,** 


H. A C H M A D

Diundangkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU, 


D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012 NOMOR:



INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana memadai 2 Jumlah gedung sekolah yang dibangun
2 Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan	1 Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan 2 Angka partisipasi murni seluruh jenjang pendidikan 3 Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan 4 Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan 5 Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan
3 Peningkatan proporsi guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang disyaratkan	1 Persentase guru yang telah bersertifikasi
4 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD	1 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas
5 Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	1 Rata-rata kunjungan poliklinik (rawat jalan) per hari
6 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD	1 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di RSUD
7 Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan	1 Persentase peningkatan jalan 2 Persentase peningkatan jembatan 3 Persentase pemeliharaan jalan 4 Persentase pemeliharaan jembatan
8 Meningkatnya kinerja dan berkurangnya tingkat kerusakan jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan banjir	1 Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
9 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air bersih serta energi listrik	1 Jumlah rumah ibadah, surau suluk, balai adat, LKA dan sarana prasarana olah raga yang terbangun 2 Jumlah unit pengolahan air bersih pada setiap kecamatan
10 Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan	1 Jumlah panjang jalan lingkungan/ hamparan semenisasi dalam kondisi baik
11 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah	1 Jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang sesuai pemanfaatannya
12 Penguatan infrastruktur pedesaan	1 Jumlah desa yang mendapat kegiatan pembangunan pada Program RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMAS dan Pembangunan Rumah Layak Huni serta jumlah pemukiman perumahan yang memiliki MCK yang layak
13 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 2 Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
14 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air bersih serta energi listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang 2 Jumlah terminal angkutan yang sesuai standar pelayanan 3 Jumlah fasilitas fisik sisi darat dan sisi udara Bandara Pasir Pengaraian
15 Tersedianya data, prasarana, fasilitas, dan norma standar dalam peningkatan dan pengelolaan pelayanan perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang uji 2 Persentase penurunan pelanggaran angkutan barang dan penumpang
16 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warung internet yang dikeluarkan
17 Meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
18 Pelestarian lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase penanganan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun) yang dihasilkan oleh pabrik atau industri 2 Pencegahan pencemaran lingkungan
19 Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase penduduk yang memiliki KK dan e - KTP 2 Jumlah akta capil yang diterbitkan per tahun: <ul style="list-style-type: none"> . akta kelahiran . akta kematian . akta perkawinan . akta perceraian . pencatatan pengangkatan anak/adopsi . pencatatan pengakuan/pengesahan anak
20 Meningkatkan jumlah peserta KB aktif menurunnya angka keluarga prasejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1 Prevalensi KB aktif pada pasangan usia subur 2 Perlindungan hak reproduksi Individu 3 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
21 Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan remaja	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase peningkatan perlindungan perempuan dan anak
22 Meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase penanganan masalah PMKS di Kabupaten Rokan Hulu <ul style="list-style-type: none"> . Persentase KAT yang diberdayakan . Persentase pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya . Persentase pelayanan terhadap korban bencana . Persentase pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu melalui panti dan luar panti . Persentase pelayanan bagi penyandang cacat dan mental
23 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase pengangguran usia produktif 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja
24 Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kawasan transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1 Tingkat pembinaan daerah transmigrasi
25 Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lebih baik pasca terjadinya bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jumlah perbaikan infrastruktur dan perumahan akibat bencana alam/sosial
f Meningkatkan pertumbuhan perindustrian dan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nilai produksi industri, Jumlah Industri yang kuat dan persentase tenaga kerja di sektor industri: <ol style="list-style-type: none"> a. Industri mikro b. Industri kecil c. Industri menengah d. Industri besar
27 Meningkatkan kinerja perkoperasian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Persentase koperasi aktif dan koperasi yang berbadan hukum 2 Jumlah koperasi berkualifikasi "berkualitas" 3 Jumlah volume usaha UKM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
28 Meningkatkan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera	1 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha yang melaksanakan tera ulang alat ukur, timbang, takar, perlengkapan
29 Pengembangan dan pembinaan objek dan daya tarik budaya dan wisata religi	1 Jumlah ajang bagi masyarakat seni untuk mengekspresikan diri
30 Peningkatan kunjungan wisatawan	1 Jumlah pengelolaan aset kebudayaan dan pariwisata Rokan Hulu
31 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Angka konflik 2 Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
32 Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dalam penegakan peraturan daerah	1 Rasio aparat trantib terhadap jumlah penduduk 2 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
33 Terwujudnya peningkatan kualitas dan transparansi informasi pembangunan daerah yang terpadu dan aspiratif	1 Persentase program/ kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan
34 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Jumlah pembinaan bidang usaha ekonomi kerakyatan
35 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Persentase paket yang dilelang menggunakan sistem LPSE
36 Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal	1 Persentase pelaksanaan program/kegiatan SKPD yang teralisasi 2 Persentase panjang batas daerah yang ditetapkan 3 Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
37 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1 Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disahkan
38 Pembinaan kualitas pembinaan agama islam	1 Terselenggaranya pelayanan jemaah haji
39 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan ke masyarakat
40 Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal	1 Jumlah rapat paripurna dan alat kelengkapan DPRD setiap tahun
41 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1 Jumlah rancangan peraturan daerah yang diselesaikan menjadi peraturan daerah
42 Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1 Rasio pendidikan formal pegawai berbagai tingkatan (SD, SMP, SMA, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3)
43 Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	1 Terdapat data base pegawai dan tenaga honorer data base setiap tahun 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat dan yang akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya
44 Peningkatan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Kontribusi PAD terhadap APBD 2 Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah 3 Peningkatan penerimaan sektor PBB
45 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1 Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tepat waktu 2 Evaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
46 Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal	1 Persentase hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti 2 Persentase jumlah pemeriksaan PKPT yang diterbitkan
47 Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1 Indeks kepuasan masyarakat
48 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1 Persentase perizinan yang diselenggarakan 2 Persentase izin yang diterbitkan
49 Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	1 Jumlah investor yang masuk melalui promosi investasi didalam dan luar negeri, nilai investasi PMA dan PMDN
50 Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur	1 Peningkatan kualitas dan kemampuan anggota Korpri 2 Rapat kerja dan koordinasi Korpri
51 Peningkatan ketahanan pangan	1 Jumlah cadangan pangan masyarakat 2 Jumlah informasi ketersediaan pangan daerah 3 Jumlah desa rawan pangan yang dibina
52 Peningkatan kemampuan lembaga petani	1 Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya
53 Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan	1 Tingkat kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
54 Penguatan kelembagaan desa dan kemandirian desa	1 Tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat
55 Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang utuh, autentik dan handal	1 Persentase instansi yang sudah menerapkan sistem kearsipan secara baku 2 Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang utuh, autentik dan andal
56 Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca	1 Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupan layanan perpustakaan 2 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
57 Peningkatan ketahanan pangan	1 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi padi, palawija 2 Tersedianya benih/bibit, pupuk dan pestisida tanaman padi sawah, padi gogo, jagung dan kedele 3 Persentase luas areal sawah yang mampu diairi air irigasi
58 Peningkatan kemampuan lembaga petani	1 Persentase kelembagaan pertanian yang aktif
59 Meningkatnya produksi dan sentra-sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura
60 Tertibnya peruntukan dan penggunaan kawasan	1 Jumlah kasus ilegal logging 2 Jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan 3 Luas lahan kritis
61 Meningkatnya pengelolaan hutan secara adil dan berkelanjutan	1 Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu 2 Jumlah izin hutan tanaman rakyat
62 Meningkatnya produksi perkebunan	1 Persentase peningkatan produktivitas kebun rakyat 2 Luas lahan perkebunan rakyat
63 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air bersih serta energi listrik	1 Meningkatnya penertiban kegiatan pertambangan rakyat 2 Persentase ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak serta tertibnya pendistribusian minyak dan gas

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
63 Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan	3 Ketersediaan penerangan listrik perkotaan dan perdesaan 1 Konsumsi protein hewani asal ikan dan ternak 2 Produksi perikanan dan populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner 3 Peningkatan pendapatan petani
64 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing	1 Peningkatan usaha-usaha agrobisnis dan agroindustri perikanan dan peternakan 2 Terlindunginya kawasan konservasi perikanan di perairan umum dan pengembangan budidaya ternak lokal

I. **BUPATI ROKAN HULU,**



H. A C H M A D



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
2. **Tugas** : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pembinaan pendidikan luar sekolah serta pemuda dan olah Raga.
3. **Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik formal, non-formal, maupun in-formal serta lingkup kepemudaan dan keolahragaan;
 2. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, pendidikan dan pengajaran, serta kepemudaan dan keolahragaan;
 3. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas;
 4. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional, dan staf di lingkungan dinas;
 5. Pelaporan pelaksanaan tugas dinas sebagai pertanggung-jawaban;
 6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 7. Menetapkan program kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan rencana pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan sekretariat dan masing-masing bidang teknis;
 8. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan kewenangan yang ada ;
 9. Memberikan pelayanan perizinan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
 10. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 11. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 12. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
 13. Memeriksa hasil kerja staf
 14. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
 15. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati;
 16. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	
1 Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang	1 Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan	1 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana memadai	1 Untuk mengukur ketersediaan sarana pembelajaran seluruh jenjang pendidikan	
		2 Jumlah gedung sekolah yang dibangun	2 Untuk mengukur ketersediaan sarana pembelajaran seluruh jenjang pendidikan	
		3 Jumlah perizinan kursus yang dilayani	3 Untuk mengukur ketersediaan sarana pembelajaran seluruh jenjang pendidikan	
	2 Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan		1 Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan	1 Untuk mengukur tingkat aksesibilitas seluruh jenjang pendidikan
			2 Angka partisipasi murni seluruh jenjang pendidikan	2 Untuk mengukur tingkat aksesibilitas seluruh jenjang pendidikan
			3 Angka partisipasi sekolah seluruh jenjang pendidikan	3 Untuk mengukur tingkat aksesibilitas seluruh jenjang pendidikan
			4 Angka putus sekolah seluruh jenjang pendidikan	4 Untuk mengukur tingkat aksesibilitas seluruh jenjang pendidikan
			5 Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan	5 Untuk mengukur tingkat kualitas seluruh jenjang pendidikan
			6 Angka mengulang seluruh jenjang pendidikan	6 untuk mengukur tingkat kualitas seluruh jenjang pendidikan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
		7 Persentase sekolah yang terakreditasi	7 Untuk mengukur kualitas tatalaksana seluruh jenjang pendidikan
		8 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dibina	8 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan seluruh jenjang pendidikan
		9 Angka rata-rata lama sekolah seluruh jenjang pendidikan	9 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan seluruh jenjang pendidikan
		10 Jumlah sekolah yang dibina seluruh jenjang pendidikan	10 Untuk mengukur peningkatan kualitas seluruh jenjang pendidikan
		11 Jumlah perijinan yang diberikan atas pendirian sekolah	11 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan seluruh jenjang pendidikan
		12 Pemberian bantuan kepada penyelenggara paud dan play group	12 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini
		13 Angka transisi SMP ke SMA / SMK / MA	13 Untuk mengukur meningkatnya angka transisi
	3 Peningkatan proporsi guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang disyaratkan	1 Persentase guru yang telah bersertifikasi	1 Untuk mengukur tingkat kualitas tenaga pendidik
		2 Jumlah guru berprestasi tingkat provinsi dan nasional	2 Untuk mengukur tingkat kualitas tenaga pendidik
	4 Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca	1 Jumlah warga belajar seluruh jenjang kependidikan keaksaraan fungsional yang dilayani	1 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan seluruh jenjang pendidikan
		2 Jumlah penyelenggara program keaksaraan fungsional seluruh jenjang pendidikan	2 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan seluruh jenjang pendidikan
		3 Jumlah kelompok Paket A, B dan C yang dibina	3 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal
		4 Jumlah tutor pendidikan kesetaraan yang dilayani	4 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal
		5 Jumlah peserta didik kursus	5 Untuk mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal
2 Meningkatkan peran serta kepemudaan	1 Peningkatan prestasi dan pembinaan olahraga, kepemudaan dan kepramukaan	1 Jumlah kegiatan pembinaan paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dilakukan	1 Untuk mengukur prestasi paskibraka, kepemudaan dan kepramukaan yang dibina
		2 Jumlah cabang olah raga yang dibina	2 Untuk mengukur peningkatan sarana dan prasarana olah raga
		3 Jumlah lomba / festival yang dilaksanakan	3 Untuk mengukur ketersediaan sarana pembelajaran pendidikan dasar dan luar biasa yang memadai
		4 Jumlah tenaga keolahragaan yang dibina	4 Untuk mengukur mutu dan kualitas tenaga keolahragaan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis lingkup kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan pembekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup kesehatan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup kesehatan;
 4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
 5. Pembinaan terhadap UPTD di bidang kesehatan;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif	1 Menurunkan angka kematian ibu nifas dan ibu bersalin	1 Cakupan kunjungan Ibu hamil (K4)	1 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		2 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	2 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	3 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		4 Cakupan pelayanan nifas	4 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		5 Cakupan kunjungan bayi	5 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		6 Cakupan pelayanan anak balita	6 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		7 Cakupan ibu hamil risti yang dirujuk	7 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		8 Cakupan angka kematian ibu	8 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		9 Cakupan angka kematian bayi	9 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
	2 Menjamin mutu dan peningkatan pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya	1 Cakupan desa/kelurahan UCI	1 Untuk menilai pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit menular pada masyarakat dan lingkungan
		3 Menurunkan kasus gizi kurang dan gizi buruk	1 Cakupan pemberian makanan pendamping Asi pada anak usia 6 s/d 24 bulan dari keluarga miskin
	2 Balita gizi buruk yang mendapat perawatan		2 Untuk menilai derajat kesehatan masyarakat
	3 Cakupan pemberian vitamin A		3 Untuk menilai derajat kesehatan masyarakat
	4 Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan status kesehatan	1 Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	1 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
	5 Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	1 Cakupan peserta KB aktif	1 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga
		2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2 Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
	6 Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular	<p>3 Cakupan posyandu aktif</p> <p>1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit</p> <p>a). Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun</p> <p>b). Penemuan penderita pneumonia balita</p> <p>c). Penemuan pasien baru TB BTA positif</p> <p>d). Penderita DBD yang ditangani</p> <p>e). Penemuan penderita diare</p> <p>2 Cakupan pengobatan penderita TB</p> <p>3 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam</p>	<p>3 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga</p> <p>1 Untuk menilai pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit menular pada masyarakat dan lingkungan</p> <p>2 Untuk menilai pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit menular pada masyarakat dan lingkungan</p> <p>3 Untuk menilai pencegahan, pemberantasan dan pengamatan penyakit menular pada masyarakat dan lingkungan</p>
	7 Meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	<p>1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin</p> <p>2 Cakupan desa siaga aktif</p>	<p>1 Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin</p> <p>2 Untuk menilai peningkatan kesehatan individu dan keluarga</p>
	8 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD	<p>1 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas</p> <p>2 Cakupan pelayan gawat darurat level satu di RSUD</p>	<p>1 Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat</p> <p>2 Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat</p>
	9 Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	<p>1 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas aparatur dibidang kesehatan</p>



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**
2. **Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah.
3. **Fungsi** : 1. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, berkeadilan di setiap strata sosial ekonomi masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan kuratif, preventif, dan promotif	1 Meningkatkan derajat kesehatan, pelayanan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 2 Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada puskesmas dan RSUD	1 Rata-rata kunjungan poliklinik (rawat jalan) per hari	1 Karena kualitas pelayanan yang baik akan tergambar dari kunjungan rawat jalan
		1 Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60 - 85%	1 Karena kualitas pelayanan yang baik akan tergambar dari BOR yang ideal
		2 Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6 - 9 hari	2 Karena kualitas pelayanan yang baik akan tergambar dari nilai ALOS yang ideal
		3 Bed Turn Over (BTO) yaitu frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur di pakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun) Idealnya dalam setahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 - 50 kali	3 Karena kualitas pelayanan yang baik akan tergambar dari nilai BTO yang ideal
		4 Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya di isi	4 Karena kualitas pelayanan yang baik akan tergambar dari nilai TOI yang ideal
		5 Net death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap - tiap 1000 penderita keluar. Nilai NDR yang dianggap dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000	5 Karena kualitas pelayanan yang baik akan tergambar dari nilai NDR yang dapat ditolerir
		6 Gross Death Rate (GDR) yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar	6 Karena kualitas pelayanan yang baik akan tergambar dari nilai GDR yang sebaiknya
	7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di RSUD	7 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, murah dan merata	



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Pertamanan, Kebersihan, Pemakaman, Air Bersih dan Permukiman serta sarana dan prasarana pasar.
3. Fungsi :
1. Perumusan;
 2. Pengkoordinasian penyusunan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 5. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
 6. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan lingkup bidang di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
 7. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang – Bidang dan kelompok jabatan fungsional;
 8. Pembinaan administrasi perkantoran;
 9. Pelaksanaan hubungan kerja dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 10. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 11. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
 12. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah sehingga mampu mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: jalan, jembatan, irigasi, drainase, perumahan, pemukiman, tata ruang, energi listrik, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya	1 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air bersih serta energi listrik	1 Jumlah rumah ibadah, surau suluk , balai adat, LKA dan sarana prasarana olah raga yang terbangun	1 Terbangunnya rumah ibadah yang baik bagi kegiatan spritual masyarakat dan fasilitas olah raga yang baik
		2 Jumlah penataan areal pemakaman	2 Tertatanya areal pemakaman bagi masyarakat
		3 Jumlah unit pengolahan air bersih pada setiap kecamatan	3 Tersedianya air bersih bagi masyarakat dilingkungan perumahan perkotaan dan perdesaan
		4 Jumlah los pasar yang tersedia	4 Tersedianya kebutuhan los pasar yang cukup untuk kegiatan berdagang dan berbelanja bagi masyarakat
		5 Jumlah retribusi air bersih perkotaan dan perdesaan	5 Penyediaan air bersih
	2 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	1 Jumlah bangunan yang memiliki IMB	1 Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
		2 Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik	2 Tersedianya kawasan yang siap untuk dijadikan lahan pemukiman bagi masyarakat
		3 Jumlah tempat pembuangan sampah	3 Terciptanya lingkungan perumahan yang bersih, sehat dan nyaman serta terbebas dari sampah
		4 Jumlah retribusi kebersihan dan persampahan	4 Menjadikan kota bersih dan nyaman
		5 Jumlah ruang terbuka hijau dan ruang publik yang tersedia	5 Membuat lingkungan kota menjadi nyaman dan indah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
<p>2 Mewujudkan keseimbangan pembangunan daerah, pembangunan antar wilayah desa dan wilayah perkotaan. Wujud keseimbangan pembangunan antar wilayah ditandai oleh adanya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pemenuhan sarana prasarana tingkat desa, serta mendorong terbentuknya desa mandiri dan sejahtera</p>	<p>3 Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan</p>	<p>1 Jumlah panjang jalan lingkungan/ hamparan semenisasi dalam kondisi baik</p> <p>2 Jumlah panjang drainase dalam kondisi yang baik</p>	<p>1 Tersedianya jalan dilingkungan perumahan dan pemukiman</p> <p>2 Tersedianya drainase dilingkungan perumahan dan pemukiman</p>
	<p>4 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana aparatur pemerintah</p>	<p>1 Jumlah gedung kantor dan rumah dinas aparatur pemerintah yang sesuai pemanfaatannya</p>	<p>1 Belum tersedianya gedung kantor pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan</p>
	<p>1 Penguatan infrastruktur pedesaan</p>	<p>1 Jumlah desa yang mendapat kegiatan pembangunan pada Program RIS-PNPM / PPIP, PAMSIMAS dan Pembangunan Rumah Layak Huni serta jumlah pemukiman perumahan yang memiliki MCK yang layak</p>	<p>1 Tersedianya infrasturktur perdesaan yang baik dan terciptanya lingkungan perumahan dan perairan yang bersih</p>



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
2. **Tugas** : Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
 2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 4. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari pusat dan provinsi, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
 6. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Bappeda;
 7. Fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 8. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 9. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	1 Untuk menjamin tersedianya dokumen-dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan waktu, alur dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
		2 Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan	2 Untuk menjamin terdapatnya konsistensi antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
		3 Persentase program/ kegiatan fisik SKPD yang dievaluasi pertahun	3 Untuk mengukur ketepatan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan perencanaan pada tingkat implementasi SKPD
		4 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat perencanaan	4 Untuk meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis
		5 Kualitas kelengkapan data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan	5 Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
		6 Tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah	6 Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

- 1. Satuan Kerja** : **DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
- 2. Tugas** : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- 3. Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 2. Penyelenggaraan umum pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	
1 Menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah sehingga mampu mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: jalan, jembatan, irigasi, drainase, perumahan, pemukiman, tata ruang, energi listrik, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya	1 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air bersih serta energi listrik	1 Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	1 Mewujudkan peningkatan keselamatan transportasi	
		2 Persentase pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas	2 Mewujudkan peningkatan keselamatan transportasi	
		3 Jumlah terminal angkutan yang sesuai standar pelayanan	3 Terwujudnya akseibilitas/keterjangkauan pelayanan perhubungan yang optimal	
		4 Jumlah fasilitas fisik sisi darat dan sisi udara Bandara Pasir Pengaraian	4 Terwujudnya akseibilitas/keterjangkauan pelayanan perhubungan yang optimal	
	2 Tersedianya data, prasarana, fasilitas, dan norma standar dalam peningkatan dan pengelolaan pelayanan perhubungan	1 Persentase jumlah kendaraan angkutan barang dan penumpang yang uji	1 Mewujudkan peningkatan keselamatan transportasi	
		2 Persentase beroperasinya alat pengujian kendaraan secara layak	2 Mewujudkan peningkatan keselamatan transportasi	
		3 Persentase pelayanan jasa perijinan usaha angkutan	3 Meningkatnya ketertiban usaha angkutan	
		4 Persentase penurunan pelanggaran angkutan barang dan penumpang	4 Meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di komunikasi dan informatika	
	2 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Jumlah rekomendasi menara telekomunikasi dan warung internet yang dikeluarkan	1 Meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika
			2 Dokumen pengawasan tingkat kelayakan sarana prasarana telekomunikasi	2 Meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika
3 Jumlah SDM bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dibina			3 Meningkatkan kinerja aparatur dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika	



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : **BADAN LINGKUNGAN HIDUP**
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup.
3. Fungsi : 1. Melaksanakan pembinaan kewenangan dibidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Bupati Rokan Hulu ;
2. Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang lingkungan hidup;
3. Melaksanakan Pengelolaan data, informasi serta evaluasi kegiatan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan koordinasi antar instansi terkait, lembaga kemasyarakatan dan Unit Kerja yang ada kaitannya dengan kegiatan dan pelaksanaan Lingkungan Hidup;
5. Melaksanakan administrasi umum, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan, dan perlengkapan badan, penegakan hukum (peraturan perundang-undangan) di bidang lingkungan hidup.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN		
1 Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	1 Meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran serta kerusakan lingkungan sumber daya alam	1 Pemenuhan baku mutu air sungai, limbah industri, limbah rumah sakit	1 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan		
		2 Pemenuhan baku mutu udara lokasi padat lalu lintas dan cerobong industri	2 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan		
		3 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaan yang menggunakan IPAL	3 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan		
		4 Persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	4 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan		
	2 Pelestarian lingkungan hidup	1 Pelestarian lingkungan hidup	1 Persentase penanganan limbah B3 (bahan, berbahaya dan beracun) yang dihasilkan oleh pabrik atau industri	1 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan	
			2 Penegakan hukum lingkungan	2 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan	
			3 Pencegahan pencemaran lingkungan	3 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan	
			4 Pelestarian lingkungan hidup	4 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan	



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 2. Fasilitasi dan penyerasian kebijakan kependudukan, melaksanakan penyusunan perencanaan, kualitas, pengendalian kuantitas penduduk
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta penyerasian kebijakan perencanaan, kualitas, pengendalian kuantitas penduduk;
 6. Pelaksanaan penyusunan indikator kependudukan;
 7. Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	1 Persentase penduduk yang memiliki KK dan e - KTP 2 Jumlah akta capil yang diterbitkan per tahun: . akta kelahiran . akta kematian . akta perkawinan . akta perceraian . pencatatan pengangkatan anak/adopsi . pencatatan pengakuan/pengesahan anak 3 Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu berbasis IT 4 Persentase penerapan e - KTP 5 Jumlah peserta pelatihan administrasi kependudukan 6 Persentase kebijakan pelayanan yang disosialisasikan 7 Pengarsipan administrasi kependudukan	1 Untuk mengukur kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan 2 Mengukur jumlah penduduk yang mendaftarkan akta-akta catatan sipil 3 Mengukur penduduk Kabupaten Rokan Hulu sesuai kebutuhan dan waktu 4 Mewujudkan penerapan e-KTP yang efektif dan efisien berbasis IT 5 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan SDM tenaga administrasi kependudukan 6 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan 7 Untuk mengukur kinerja dalam pelayanan administrasi kependudukan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : **BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Fungsi : 1. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
2. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Badan;
3. Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Meningkatkan keluarga sejahtera dan perlindungan anak dan remaja serta persamaan gender	1 Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menurunnya angka keluarga prasejahtera	1 Prevalensi KB aktif pada pasangan usia subur	1 Untuk menilai efektifitas pelayanan KB
		2 Perlindungan hak reproduksi Individu	2 Untuk menilai efektifitas perlindungan hak reproduksi individu
		3 Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	3 Mengukur efektifitas kebijakan dibidang keluarga sejahtera dan mengukur efektifitas kelompok masyarakat peduli KB
	2 Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan remaja	1 Persentase peningkatan pengarusutamaan gender yang tertuang dalam kebijakan pemerintah	1 Menilai peningkatan pengarusutamaan gender
		2 Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya	2 Menilai peningkatan kualitas hidup perempuan
		3 Persentase peningkatan perlindungan perempuan dan anak	3 Menilai peningkatan perlindungan perempuan dan anak



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
2. **Tugas** : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
3. **Fungsi** :
1. Menentukan visi dan misi dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 2. Merumuskan rencana dan program pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 3. Menyusun rencana anggaran program dan kegiatan tahunan dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 4. Membuat rencana pembinaan dan bimbingan teknis dibidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan permasalahan daerah;
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan membina kerjasama dengan pihak lain yang dianggap perlu;
 6. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana;
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan merencanakan tindak lanjut;
 8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier terhadap pegawai dilingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan baik teknis maupun keuangan kepada Bupati Rokan Hulu;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati Rokan Hulu.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mengembalikan dan meningkatkan kemampuan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan didukung partisipasi masyarakat	1 Meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1 Persentase penanganan masalah PMKS di Kabupaten Rokan Hulu . Persentase KAT yang diberdayakan . Persentase pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya . Persentase pelayanan terhadap korban bencana . Persentase pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu melalui panti dan luar panti . Persentase pelayanan bagi penyandang cacat dan mental	. Besarnya jumlah warga KAT yang belum diberdayakan . Jumlah masyarakat miskin/ kurang mampu . Besarnya jumlah korban bencana alam setiap tahun . Jumlah anak terlantar, anak nakal, balita terlantar dan lanjut usia terlantar . Jumlah penyandang cacat
	2 Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat	2 Jumlah kelompok ORSOS, PSM dan lembaga sosial lainnya yang telah diberdayakan	2 Jumlah orsos, lembaga dan PSM
2 Meningkatnya keterampilan pencari kerja serta pengembangan kemampuan lembaga TERKAIT dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku	1 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 Persentase pengangguran usia produktif 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 3 Persentase perusahaan/ pengusaha yang mentaati peraturan 4 Persentase penyelesaian dan perselisihan perburuhan/ industrial	1 Untuk menilai penurunan jumlah pengangguran usia produktif 2 Untuk menilai penurunan jumlah pengangguran usia produktif 3 Untuk menilai perusahaan/ pengusaha yang mentaati peraturan 4 Untuk menilai penurunan penyelesaian dan perselisihan perburuhan/ industrial
	2 Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi	1 Tingkat pembinaan daerah transmigrasi	1 Untuk menilai pelayanan daerah transmigrasi



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
2. **Tugas** : Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana dalam mendukung rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. **Fungsi** :
1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang barang;
 7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanganan penangan kedaruratan serta kesiapan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi akibat bencana	1 Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lebih baik pasca terjadinya bencana	1 Jumlah perbaikan infrastruktur dan perumahan akibat bencana alam/sosial	1 Untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana
	2 Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran melalui peningkatan kapasitas aparatur	2 Jumlah personil dan pencegahan bahaya kebakaran	2 Untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha
	3 Terwujudnya sistem penanganan bencana yang handal	3 Jumlah masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana dan berkurangnya resiko bencana	3 Untuk meningkatkan koordinasi penanganan kedaruratan dan pemantapan dari dalam, meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
2. **Tugas** : Melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan koperasi, perindustrian dan perdagangan di daerah sesuai dengan kebijakan Bupati.
3. **Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup koperasi, perindustrian dan perdagangan yang meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, perindustrian dan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, metrologi legal usaha industri, informasi industri dan pengawasan industri;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup koperasi, perindustrian dan perdagangan;
 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tuas pokok dan fungsinya.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	
1 Menyediakan, memberikan dan memfasilitasi kepada pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya (permodalan, keberlanjutan pasar, kelembagaan, kapasitas dan kualitas produk)	1 Meningkatkan pertumbuhan perindustrian dan perdagangan	1 Nilai produksi industri, Jumlah Industri yang kuat dan persentase tenaga kerja di sektor industri: a. Industri mikro b. Industri kecil c. Industri menengah d. Industri besar	1 Mengukur upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai produksi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri	
		2 Jumlah produk industri yang memenuhi standar: a. SNI b. Departemen Kesehatan	2 Mengukur jumlah produk yang telah memenuhi standar	
		3 Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna	3 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan IKM yang menggunakan teknologi industri	
		4 Jumlah SDM pelaku industri yang terampil	4 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan ketrampilan SDM pelaku industri	
		5 Jumlah hasil IKM yang dipromosikan	5 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan promosi hasil industri kecil menengah	
	2 Meningkatkan kinerja perkoperasian		1 Persentase koperasi aktif dan koperasi yang berbadan hukum	1 Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan
			2 Jumlah koperasi berkualifikasi "berkualitas"	2 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
			3 Persentase koperasi yang SDM nya terlatih	3 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
			4 Persentase koperasi yang bermitra dengan BUMN/S	4 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
			5 Jumlah volume usaha UKM	5 Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan
			6 Prosentase UMK dibanding UMKM	6 Mengukur efektivitas kebijakan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
	<p>3 Meningkatkan pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah di tera</p>	<p>7 Persentase UKM yang SDM-nya terlatih</p> <p>8 Persentase UKM yang bermitra dengan BUMN/S</p> <p>1 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha yang melaksanakan tera ulang alat ukur, timbang, takar, perlengkapan</p> <p>2 Persentase kasus perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti</p> <p>3 Jumlah sarana dan prasarana pasar yang tersedia</p> <p>4 Jumlah pasar yang ditertibkan</p>	<p>7 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi</p> <p>8 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi</p> <p>1 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen</p> <p>2 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan perlindungan terhadap konsumen</p> <p>3 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan perdagangan didalam menggerakkan ekonomi masyarakat</p> <p>4 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan perdagangan didalam menggerakkan ekonomi masyarakat</p>



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
2. **Tugas** : Merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. **Fungsi** :
1. Perumusan sasaran urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 2. Pengkoordinasian penyusunan tujuan dan program urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 5. Merumuskan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 6. Mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 8. Membina urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 9. Mengarahkan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 10. Mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati selaku Kepala Daerah.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan pengembangan budaya Melayu yang islami, sejuk dan toleran dalam kerangka kehidupan sosial masyarakat majemuk yang modern dan berkelanjutan	1 Pengembangan dan pembinaan objek dan daya tarik budaya dan wisata religi	1 Jumlah ajang bagi masyarakat seni untuk mengekspresikan diri	1 Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelestarian budaya daerah
2 Meningkatnya peran sektor pariwisata dan meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB	1 Peningkatan kunjungan wisatawan 2 Peningkatan pelestarian adat dan budaya daerah	1 Jumlah pengelolaan aset kebudayaan dan pariwisata Rokan Hulu 1 Jumlah pelaksanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2 Jumlah pengelolaan dan data peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 3 Jumlah perkembangan alat musik tradisional di Rokan Hulu	1 Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata dan kebudayaan 1 Untuk meningkatkan pelestarian peristiwa-peristiwa budaya yang ada di Rokan Hulu 2 Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya yang ada di Rokan Hulu 3 Mengembangkan dan melestarikan alat musik tradisional di Rokan Hulu



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
2. **Tugas** : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
3. **Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik lingkup ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan dan pengawasan orang asing, politik dan kemasyarakatan dan fasilitas penanganan politik;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Angka konflik 2 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat 3 Pembinaan politik daerah 4 Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 Untuk menilai tingkat keamanan masyarakat 2 Untuk menilai peningkatan aspirasi masyarakat 3 Untuk menilai terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan 4 Untuk menilai terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
2. **Tugas** : Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. **Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pemerintahan kabupaten;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Meningkatkan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	1 Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dalam penegakan peraturan daerah	1 Rasio aparat trantib terhadap jumlah penduduk 2 Angka kriminalitas 3 Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat 4 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 5 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya menurunkan kriminalitas dan konflik di masyarakat 2 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya menurunkan kriminalitas dan konflik di masyarakat 3 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya menurunkan kriminalitas dan konflik di masyarakat 4 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya menurunkan kriminalitas dan konflik di masyarakat 5 Mengukur upaya yang dilakukan dalam peningkatan kapasitas pegawai



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI**
2. **Tugas** : Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah
3. **Fungsi** : 1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan	1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan transparansi informasi pembangunan daerah yang terpadu dan aspiratif	1 Persentase program/ kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		2 Frekuensi pelayanan pemberian informasi kepada <i>stakeholder</i>	2 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		3 Jumlah media masa yang mempublikasikan program kegiatan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	3 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
	2 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Jumlah pembinaan bidang usaha ekonomi kerakyatan	1 Mengukur kinerja dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pelaku usaha
	3 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Jumlah SKPD yang memiliki website	1 Mengukur jendela informasi kepada masyarakat dari SKPD yang bersangkutan
		2 Persentase paket yang dilelang menggunakan sistem LPSE	2 Mengukur pemakaian sistem LPSE dalam proses pelelangan barang/jasa
		3 Jumlah SKPD yang telah terkoneksi dengan jaringan internet/intranet kabupaten	3 Mengukur pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan e-government
	4 Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal	1 Jumlah pelayanan protokoler kepada Bupati dan Wakil Bupati dan sederetan muspida	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		2 Terlaksananya ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah pertahun	2 Masih kurangnya PNS di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki sertifikasi keahlian barang/jasa pemerintah
		3 Persentase pelaksanaan program/kegiatan SKPD yang teralisasi	3 Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan SKPD
		4 Persentase realisasi lahan untuk kepentingan umum dan perkantoran	4 Untuk mengukur luas lahan yang dibebaskan bagi kepentingan umum dan perkantoran
		5 Persentase panjang batas daerah yang ditetapkan	5 Semakin jelas batas antar daerah di Kabupaten Rokan Hulu

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
		6 Persentase penyelesaian bidang tanah sengketa	6 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		7 Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	7 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		8 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan dan di kecamatan	8 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
2 Meningkatkan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1 Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang disahkan	1 Sebagai pedoman/landasan hukum melaksanakan kegiatan
		2 Persentase produk hukum yang diterima masyarakat	2 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		3 Persentase diseminasi peraturan daerah baru	3 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		4 Jumlah peserta penyuluhan hukum	4 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		5 Persentase kasus hukum yang diselesaikan dan frekuensi pendampingan penyelesaian perkara	5 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
		6 Persentase penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	6 Mewujudkan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
3 Mewujudkan pengembangan budaya Melayu yang islami, sejuk dan toleran dalam kerangka kehidupan sosial masyarakat majemuk yang modern dan berkelanjutan	1 Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadah	1 Jumlah tempat ibadah yang mendapatkan bantuan pemerintah	1 Untuk menilai pelayanan sosial dan keagamaan
	2 Meningkatkan pembinaan terhadap kerukunan hidup beragama		
	3 Pembinaan kualitas pembinaan agama islam	1 Terselenggaranya pelayanan jemaah haji	1 Untuk menilai pelayanan sosial dan keagamaan
		2 Terselenggaranya MTQ tingkat kabupaten dan provinsi	2 Untuk menilai pelayanan pendidikan dan keagamaan
		3 Terlaksananya peringatan hari besar Islam tingkat Kabupaten	3 Untuk menilai pelayanan sosial dan keagamaan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **SEKRETARIAT DPRD**
2. **Tugas** : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, meliputi administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. **Fungsi** : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan transparansi informasi pembangunan daerah yang terpadu dan aspiratif	1 Frekwensi penyelenggaraan konsultasi dan koordinasi DPRD dengan Pemerintah dan DPR 2 Persentase aspirasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti oleh DPRD	1 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program Sekretariat DPRD 2 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program Sekretariat DPRD
	2 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan ke masyarakat	1 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program Sekretariat DPRD
	3 Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal	1 Jumlah rapat paripurna dan alat kelengkapan DPRD setiap tahun	1 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program Sekretariat DPRD
2 Meningkatkan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1 Jumlah rancangan peraturan daerah yang diselesaikan menjadi peraturan daerah	1 Mengukur kinerja organisasi dalam upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program Sekretariat DPRD



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
2. **Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
3. **Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian;
 3. Melaksanakan manajemen PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional dalam menjalankan tugasnya;
 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1 Rasio pendidikan formal pegawai berbagai tingkatan (SD, SMP, SMA, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3)	1 Untuk menilai peningkatan kedisiplinan, profesionalisme dan produktivitas aparatur
	2 Meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan	2 Terdapat data base pegawai dan tenaga honorer data base setiap tahun	2 Untuk mendata jumlah pegawai dan tenaga honorer dan memproses kenaikan pangkat serta PNS yang memasuki pensiun dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
	3 Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur	3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat dan yang akan memasuki masa pensiun setiap tahunnya	3 Mengetahui kuantitas kebutuhan SDM selanjutnya
	4 Meningkatkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan peningkatan sistem informasi manajemen kepegawaian	1 Persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil	1 Masih banyak pegawai yang belum mengikuti diklat pengembangan karier dan masih di butuhkan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan yang kosong di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
		1 Persentase jumlah pegawai yang memenuhi aturan yang berlaku dan jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	1 Untuk menilai peningkatan kedisiplinan, profesionalisme dan produktivitas aparatur



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset.
3. Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 7. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
 8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Meningkatkan potensi sumber-sumber PAD untuk pembiayaan pembangunan daerah	1 Peningkatan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Kontribusi PAD terhadap APBD 2 Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah 3 Tersedianya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 4 Peningkatan penerimaan sektor PBB 5 Meningkatnya kualitas PPK dan bendahara SKPD dibidang penyusun laporan keuangan daerah menurut standar akuntansi pemerintah 6 Penyusunan APBD tepat waktu 7 Dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah	1 Adanya pengawasan yang inten terhadap sumber - sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang ada 2 Optimalisasi upaya penggalian sumber-sumber penerimaan baru terhadap pajak daerah dan retribusi daerah 3 Perlunya memaksimalkan sosialisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah 4 Dalam upaya penerimaan PBB perlu dilakukan perbaikan data dan melakukan pendataan 5 Dengan memberikan pembekalan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah 6 Dalam penyelesaian penyusunan APBD belum bisa tepat waktu hal ini dipengaruhi oleh instansi/lembaga terkait seperti SKPD,DPRD dan pemerintah propinsi 7 Untuk memenuhi amanat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 Tahun 2010

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
		8 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS	8 Tersedianya matrik acuan awal yang berupa program /kegiatan SKPD yang berdasarkan RKPDP tahun dalam penyusunan rancangan APBD
		9 Tersedianya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	9 Tersedianya payung hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yaitu siklus pengelolaan keuangan daerah dari rencana penganggaran , pelaksanaan APBD sampai dengan tata cara pertanggung jawaban keuangan daerah dan pelaporan keuangan
		10 Meningkatnya kualitas aparatur dibidang perpajakan dalam pertanggungjawaban keuangan SKPD	10 Dengan memberikan pembekalan atau bimbingan perpajakan dalam pertanggungjawaban keuangan SKPD
		11 Terdatanya dan terjaminnya kondisi aset/ barang daerah	11 Belum lengkapnya data aset dari seluruh SKPD dikarenakan tidak adanya penataan dan pelaporan aset yang sesuai dengan kode barang
		12 Persentase penerapan analisa standar satuan harga	12 Dalam penerapan analisa standar satuan harga masih 75% dalam penyusunan RKA dan APBD dikarenakan terbitnya DPA lebih dahulu dari pada buku standar harga
		13 Tersedianya standar belanja sebagai pedoman penyusunan anggaran	13 Tersedianya data harga / estimasi barang dan jasa pada tahun anggaran berjalan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA dan APBD
		14 Tertib pelaksanaan APBD	14 Agar dalam pola penyusunan APBD sesuai dengan aturan hukum pengelolaan keuangan yang berlaku dari sisi kode rekening belanja, program kegiatan, dan indikator kegiatan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : INSPEKTORAT

2. Tugas :

Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai bidang tugasnya.

3. Fungsi :
1. Perencanaan program pengawasan;
 2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - a. Melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang audit dan pengawasan sarana dan prasarana serta pembangunan;
 - b. Melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang audit dan pengawasan keuangan;
 - c. Melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang audit dan pengawasan pemerintahan;
 - d. Melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang audit dan pengawasan sosial dan ekonomi;
 - e. Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1 Jumlah pedoman/ kebijakan pengawasan yang terbit	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi	
		2 Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tepat waktu	2 Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan ke BPK-RI dengan sasaran memperoleh keyakinan bahwa LK entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP	
		3 Laporan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	3 Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		4 Evaluasi kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	4 Pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2 Meningkatnya efektifitas audit/ pengawasan	1	1 Persentase aparatur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai auditor melalui pembentukan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UP)	1 Belum terbentuknya jabatan fungsional pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu
			2 Persentase SDM yang mempunyai sertifikasi auditor dan P2UPD	2 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
			3 Persentase penyelesaian dan pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawasan lainnya	3 Mengukur sejauh mana mekanisme tindak lanjut penerapan SPIP dalam organisasi pemerintah daerah
	3 Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal	3	1 Persentase hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi
			2 Persentase jumlah pemeriksaan PKPT yang diterbitkan	2 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **BADAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**
2. **Tugas** : Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
3. **Fungsi** :
 1. Pelaksanaan penyusunan program BPTP2M;
 2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 3. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 4. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1 Indeks kepuasan masyarakat	1 Indikator pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan	
		2 Persentase Izin yang waktu penerbitannya lebih cepat dari ketentuan (SOP)	2 Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan dengan tidak melanggar aturan yang telah ada	
		3 Jumlah aparatur yang telah memiliki sertifikasi	3 Meningkatkan kinerja aparatur dibidang perizinan dan penanaman modal	
	2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	2	1 Persentase perizinan yang diselenggarakan	2 Jumlah seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan di Kabupaten Rokan Hulu yang belum di delegasikan kepada BPTPPM
			2 Persentase izin yang diterbitkan	3 Jumlah izin yang erbit dari total permohonan izin yang masuk dan diajukan masyarakat
			1 Tersedianya sistem informasi penanaman modal	1 Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
3 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	3	1 Tersedianya sistem informasi penanaman modal	1 Meningkatkan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
		2 Jumlah investor yang masuk melalui promosi investasi didalam dan luar negeri, nilai investasi PMA dan PMDN	1 Meningkatkan nilai investor di Kabupaten Rokan Hulu	
		2 Jumlah perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tepat waktu	2 Jumlah perusahaan yang telah melaksanakan LKPM dan yang belum melaksanakan LKPM	
		3 Jumlah koordinasi yang baik antar lembaga dalam pelaksanaan PMDN dan PMA	3 Laporan kegiatan Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal	
2 Meningkatkan perekonomian lokal melalui peningkatan iklim usaha yang kondusif yang dapat menarik investasi	1 Meningkatkan jumlah dan nilai investasi	4 Jumlah Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	4 Meningkatkan koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN RAMBAH
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN RAMBAH SAMO
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah ;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN RAMBAH HILIR
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah ;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN TANDUN
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN TAMBUSAI
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN TAMBUSAI UTARA
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN BANGUN PURBA
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN KEPENUHAN
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah ;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN UJUNGBATU
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KECAMATAN ROKAN IV KOTO**
2. **Tugas** : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
2. Tugas : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KECAMATAN KABUN**
2. **Tugas** : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KECAMATAN BONAI DARUSSALAM**
2. **Tugas** : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM**
2. **Tugas** : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KECAMATAN KEPENUHAN HULU**
2. **Tugas** : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO**
2. **Tugas** : Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kecamatan yang sesuai dengan visi dan misi;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelegaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kecamatan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kecamatan 2 PKK aktif 3 Posyandu aktif 4 Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 5 Jumlah karang taruna 6 Jumlah peserta musrenbang 7 Jumlah penduduk yang memiliki Surat Tanah (SKT dan SKGR) per tahun 8 Jumlah rekomendasi yang diterbitkan setiap tahun 9 Jumlah perizinan yang diterbitkan setiap tahun 10 Persentase peningkatan poskamling yang aktif	1 Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi 2 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 3 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 7 Untuk menjamin status kepemilikan tanah 8 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 9 Untuk mengukur tingkat pelayanan kepada masyarakat 10 Untuk menjamin ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : **KELURAHAN PASIR PENGARAIAN**
2. Tugas : Membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
1. Penyusunan visi dan misi kelurahan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kelurahan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kelurahan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean goverment</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan 2 Jumlah pos ronda yang aktif setiap tahun 3 Jumlah peningkatan tertib administrasi penduduk setiap tahun 4 Persentase peningkatan penerimaan PBB setiap tahun 5 Jumlah pelaksanaan gotong royong setiap tahun 6 Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang aktif setiap tahun	1 Untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi 2 Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban masyarakat 3 Untuk mengukur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 4 Untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban yang ada pada masyarakat 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KELURAHAN ROKAN**
2. **Tugas** : Membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kelurahan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kelurahan;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kelurahan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean goverment</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan 2 Jumlah pos ronda yang aktif setiap tahun 3 Jumlah peningkatan tertib administrasi penduduk setiap tahun 4 Persentase peningkatan penerimaan PBB setiap tahun 5 Jumlah pelaksanaan gotong royong setiap tahun 6 Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang aktif setiap tahun	1 Untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi 2 Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban masyarakat 3 Untuk mengukur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 4 Untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban yang ada pada masyarakat 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KELURAHAN TAMBUSAI TENGAH**
2. **Tugas** : Membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kelurahan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kelurahan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kelurahan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan 2 Jumlah pos ronda yang aktif setiap tahun 3 Jumlah peningkatan tertib administrasi penduduk setiap tahun 4 Persentase peningkatan penerimaan PBB setiap tahun 5 Jumlah pelaksanaan gotong royong setiap tahun 6 Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang aktif setiap tahun	1 Untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi 2 Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban masyarakat 3 Untuk mengukur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 4 Untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban yang ada pada masyarakat 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KELURAHAN KEPENUHAN TENGAH**
2. **Tugas** : Membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kelurahan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kelurahan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kelurahan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan 2 Jumlah pos ronda yang aktif setiap tahun 3 Jumlah peningkatan tertib administrasi penduduk setiap tahun 4 Persentase peningkatan penerimaan PBB setiap tahun 5 Jumlah pelaksanaan gotong royong setiap tahun 6 Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang aktif setiap tahun	1 Untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi 2 Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban masyarakat 3 Untuk mengukur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 4 Untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban yang ada pada masyarakat 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KELURAHAN KOTA LAMA**
2. **Tugas** : Membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kelurahan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kelurahan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan kelurahan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan 2 Jumlah pos ronda yang aktif setiap tahun 3 Jumlah peningkatan tertib administrasi penduduk setiap tahun 4 Persentase peningkatan penerimaan PBB setiap tahun 5 Jumlah pelaksanaan gotong royong setiap tahun 6 Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang aktif setiap tahun	1 Untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi 2 Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban masyarakat 3 Untuk mengukur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 4 Untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban yang ada pada masyarakat 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **KELURAHAN UJUNGBATU**
2. **Tugas** : Membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
3. **Fungsi** :
1. Penyusunan visi dan misi kelurahan yang sesuai dengan visi dan misi daerah;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 3. Pengkoordinasian setiap kebijakan kelurahan;
 4. Pembinaan administrasi perkantoran;
 5. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
 6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 8. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Pembinaan tata laksana pemerintahan Kelurahan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Mewujudkan kenyamanan dan kelancaran dalam pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat	1 Persentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan di kelurahan 2 Jumlah pos ronda yang aktif setiap tahun 3 Jumlah peningkatan tertib administrasi penduduk setiap tahun 4 Persentase peningkatan penerimaan PBB setiap tahun 5 Jumlah pelaksanaan gotong royong setiap tahun 6 Jumlah organisasi/lembaga kemasyarakatan yang aktif setiap tahun	1 Untuk mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran organisasi 2 Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban masyarakat 3 Untuk mengukur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 4 Untuk mengukur kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban yang ada pada masyarakat 5 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan 6 Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**
2. **Tugas** : Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan kepada seluruh unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
3. **Fungsi** :
1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
 3. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
 4. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Rokan Hulu.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	<ol style="list-style-type: none">1 Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur2 Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme pemerintahan guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada aparatur	<ol style="list-style-type: none">1 Peningkatan kualitas dan kemampuan anggota Korpri2 Rapat kerja dan koordinasi Korpri1 Tersedianya bantuan hukum dan kesadaran hukum bagi anggota KORPRI2 Peningkatan kesejahteraan bagi anggota KORPRI aktif dan yang memasuki masa pensiun3 Terlaksananya fasilitasi kegiatan olah raga bagi, seni dan budaya dan kerohanian anggota KORPRI	<ol style="list-style-type: none">1 Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota KORPRI2 Guna menciptakan ketertiban dan koordinasi tata tertib KORPRI1 Untuk memberi bantuan hukum dan sosialisasi hukum bagi anggota2 Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KORPRI dari sisi ekonomi maupun sosial3 Untuk meningkatkan fasilitasi bagi anggota KORPRI



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN**
2. **Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
3. **Fungsi** :
 1. Melaksanakan/menyelenggarakan urusan rumah tangga Kabupaten Rokan Hulu di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
 2. Melaksanakan urusan ketatausahaan serta bimbingan teknis terhadap pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 3. Mengkoordinir instansi terkait dalam rangka pengamanan ketahanan pangan daerah;
 4. Memfungsikan balai penyuluhan sebagai satuan administrasi pangkal (SATMINGKAL) penyuluh dan koordinator ketahanan pangan di tingkat kecamatan;
 5. Menyiapkan materi-materi yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
 6. Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan kepada Bupati.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	
1 Meningkatkan struktur perekonomian daerah yang lebih tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal	1 Peningkatan ketahanan pangan	1 Jumlah cadangan pangan masyarakat	1 Perlunya menjaga stabilitas pangan masyarakat agar terciptanya situasi yang kondusif	
		2 Jumlah informasi ketersediaan pangan daerah	2 Mengetahui tercapainya pola pangan harapan (PPH) masyarakat sesuai dengan standar nasional	
		3 Jumlah desa rawan pangan yang dibina	3 Mengetahui adanya desa rawan pangan yang memerlukan pembinaan teknis	
		4 Jumlah sumber pangan alternatif	4 Mengetahui tingginya tingkat konsumsi beras masyarakat	
	2 Peningkatan kemampuan lembaga petani		1 Jumlah event promosi yang diikuti	1 Mengetahui banyaknya sumber bahan pangan alternatif yang perlu untuk dipromosikan
			2 Jumlah kelompok tani yang menerapkan paket teknologi tepat guna	2 Mengetahui tinggi rendahnya tingkat penerapan paket teknologi tepat guna
			3 Persentase peningkatan modal gabungan kelompok tani (gapoktani) pengembangan usaha agribisnis perdesaan (puap)	3 Untuk mengukur kinerja gapoktani puap
			4 Jumlah Kantor Balai Penyuluhan yang memenuhi standar minimal sesuai dengan Permentan Nomor 51 Tahun 2009	4 Mengetahui banyaknya balai penyuluhan merupakan pusat penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan
			5 Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya	5 Sebagai barometer keberhasilan kinerja penyuluhan yang profesional sesuai dengan standar kemampuan kelompok tani



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA**
2. **Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
3. **Fungsi** :
1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan;
3. Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan keseimbangan pembangunan daerah, pembangunan antar wilayah desa dan wilayah perkotaan. Wujud keseimbangan pembangunan antar wilayah ditandai oleh adanya peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pemenuhan sarana prasarana tingkat desa, serta mendorong terbentuknya desa mandiri dan sejahtera	1 Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan	1 Tingkat Kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	1 Mengukur kemandirian masyarakat dan lembaga
	2 Penguatan infrastruktur pedesaan	1 Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 2 Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan	1 Mengukur efektivitas di bidang pemberdayaan masyarakat 2 Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa yang bersih, efisien, efektif, produktif dan sejahtera
	3 Penguatan kelembagaan desa dan kemandirian desa	1 Tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat	1 Mengukur efektivitas kinerja lembaga ekonomi desa sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran lembaga



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2. **Tugas** : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pembinaan, pelayanan perpustakaan dan penataan, pemeliharaan serta pelayanan arsip.
3. **Fungsi** :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup perpustakaan dan kearsipan ;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup perpustakaan dan kearsipan ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perpustakaan dan kearsipan ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) menuju pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) melalui penataan birokrasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur	1 Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang utuh, autentik dan handal	1 Persentase instansi yang sudah menerapkan sistem kearsipan secara baku	1 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan tertib arsip dan administrasi SKPD
		2 Terwujudnya pengelolaan arsip dinamis yang utuh, autentik dan andal	2 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan tertib arsip dan administrasi SKPD
		3 Pesentase instansi yang kehilangan dokumen/arsip	3 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan tertib dokumen/arsip
		4 Jumlah SDM pengelola naskah dinas yang mengikuti diklat/bimtek kearsipan	4 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan kualitas SDM petugas pengelola naskah dinas
2 Menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, berkesinambungan di tiap jenjang	1 Menurunnya angka buta aksara penduduk bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca	1 Persentase pengunjung perpustakaan dibanding cakupan layanan perpustakaan	1 Mengukur minat dan budaya baca masyarakat
		2 Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	2 Mengukur minat dan budaya baca masyarakat
		3 Jumlah koleksi buku	3 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan dalam kondisi baik
		4 Persentase perpustakaan yang baik	4 Mengukur upaya yang dilakukan dalam peningkatan minat dan budaya baca masyarakat
		5 Jumlah petugas dan peserta pelatihan tenaga pengelola perpustakaan binaan	5 Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan binaan



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**
2. **Tugas** : Melaksanakan sebagian tugas rumah tangga daerah dibidang tanaman pangan dan hortikultura serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah.
3. **Fungsi** :
1. Melaksanakan/menyelenggarakan urusan rumah tangga Kabupaten Rokan Hulu bidang tanaman pangan dan hortikultura penyusunan rencana dan program dibidang pertanian;
 2. Melaksanakan pembinaan dan mengambil kebijaksanaan terhadap tugas Kepala Bidang dan Kepala Seksi lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu;
 4. Melaksanakan proses administrasi perizinan dan pembinaan usaha dibidang sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 5. Menyiapkan materi- materi yang berkaitan dengan ekspose dan promosi kebijakan dan hasil pembangunan pertanian;
 6. Menyiapkan bahan dan alat dalam rangka pengamanan tanaman pangan dan hortikultura;
 7. Melaksanakan pengkajian spesifik lokasi teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
 8. Melaksanakan pelaksanaan dan proses urusan ketatausahaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 9. Mengembangkan pengelolaan unit pelaksanaan Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Meningkatkan struktur perekonomian daerah yang lebih tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal	1 Peningkatan ketahanan pangan	1 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi padi, palawija	1 Untuk mengukur luas areal tanam, luas areal panen, produktivitas dan produksi bahan pangan utama daerah
		2 Tersedianya benih/bibit, pupuk dan pestisida tanaman padi sawah, padi gogo, jagung dan kedele	2 Untuk menjamin ketersediaan benih/bibit, pupuk dan pestisida bahan pangan utama daerah
		3 Persentase penggunaan alat dan mesin pertanian	3 Penggunaan alsintan sebagai suatu indikator (unit)
		4 Persentase luas areal sawah yang mampu diairi air irigasi	4 Perluasan areal sawah sebagai suatu indikator (ha)
		5 Persentase pengendalian hama dan penyakit tanaman	5 Terkendalinya hama dan penyakit dengan penurunan serangan hama penyakit tanaman (ha)
		6 Persentase luas lahan yang terjangkau sarana transportasi	6 Luas lahan sawah yang mampu terjangkau dalam pengadaan saprodi dan pemasaran hasil (ha)
	2 Peningkatan kemampuan lembaga petani	1 Persentase kelembagaan pertanian yang aktif	1 Meningkatnya jumlah kelembagaan pertanian yang aktif (kelompok)
		2 Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani	2 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani sebagai suatu indikator (kelompok)
		3 Bertambahnya kelompok tani yang didampingi	3 Meningkatnya jumlah kelembagaan yang aktif (kelompok)
		4 Bertambahnya kelompok tani yang terlatih	4 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani (kelompok)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
<p>2 Mewujudkan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dari sektor-sektor yang memanfaatkan potensi lokal (<i>comparative advantage</i>) seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan</p>	<p>1 Meningkatnya produksi dan sentra-sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura</p>	<p>1 Luas areal tanam, panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura</p> <p>2 Tersedianya benih/bibit tanaman hortikultura</p>	<p>1 Untuk mengukur luas areal tanam, luas areal panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura</p> <p>5 Untuk menjamin ketersediaan bibit tanaman hortikultura (ha/kg/batang/rumpun/pot)</p>



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. **Satuan Kerja** : **DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**
2. **Tugas** : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.
3. **Fungsi** :
1. Melakukan pembinaan kewenangan di bidang kehutanan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan;
 3. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh;
 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perijinan;
 5. Melakukan penerapan dan pengkajian teknologi kehutanan dan perkebunan;
 6. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan hasil kehutanan dan perkebunan;
 7. Melakukan pengawasan, pengamanan dan pencegahan kerusakan lahan kehutanan; Melaksanakan pengembangan dan peningkatan luas areal hutan areal perkebunan sesuai peruntukannya;
 8. Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam upaya perbaikan dan perlindungan di bidang kehutanan dan perkebunan;
 9. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perencanaan;
 10. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	
1 Meningkatkan struktur perekonomian daerah yang lebih tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal	1 Peningkatan kemampuan lembaga petani	1 Jumlah pelatihan teknologi tepat guna	1 Untuk menilai peningkatan kemampuan petani	
		2 Jumlah kemitraan dalam pembangunan perkebunan	2 Untuk menilai keberhasilan dalam membina kerjasama investor dengan kelompok tani	
3 Jumlah pembinaan terhadap kelompok tani		3 Untuk meningkatkan kelembagaan petani		
2 Mewujudkan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dari sektor-sektor yang memanfaatkan potensi lokal (<i>comparative advantage</i>)	2 Tertibnya peruntukan dan penggunaan kawasan	1 Jumlah kasus <i>illegal</i> logging	1 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan	
		2 Jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan	2 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan	
		3 Jumlah kasus serangan hama gajah/satwa liar	3 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan	
		4 Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	4 Untuk menilai peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	
		5 Luas lahan kritis	5 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan	
		6 Jumlah dokumen peredaran hasil hutan	6 Untuk memantau peredaran hasil hutan	
	1 Meningkatnya pengelolaan hutan secara adil dan berkelanjutan	1 Meningkatnya pengelolaan hutan secara adil dan berkelanjutan	1 Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu	1 Untuk menilai produktifitas pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu
			2 Jumlah kelompok yang mengembangkan hasil hutan kayu dan non kayu	2 Untuk menilai peran serta masyarakat dalam pengembangan hasil hutan kayu dan non kayu
			3 Jumlah izin hutan tanaman rakyat	3 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan
		2 Meningkatnya produksi perkebunan	2 Meningkatnya produksi perkebunan	1 Persentase peningkatan produktivitas kebun rakyat
2 Persentase peningkatan penggunaan bibit bersertifikat	2 Untuk menekan peredaran bibit palsu/tidak bersertifikat			
3 Jumlah serangan OPT terhadap kebun masyarakat	3 Untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan			
4 Luas lahan perkebunan rakyat	4 Untuk menilai peningkatan perekonomian rakyat			



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pertambangan dan energi dan sumber daya mineral.
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pertambangan dan keenergian;
 2. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, pertambangan dan keenergian;
 3. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas;
 4. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional, dan staf di lingkungan dinas;
 5. Pelaporan pelaksanaan tugas dinas sebagai pertanggung-jawaban;
 6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 7. Menetapkan program kerja Dinas Pertambangan dan Energi berdasarkan rencana pembangunan daerah yang di implementasikan dalam rencana kegiatan Sekretariat dan masing-masing bidang teknis;
 8. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi berdasarkan kewenangan yang ada;
 9. Memberikan pelayanan perizinan di bidang pertambangan dan energi;
 10. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 11. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 12. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
 13. Memeriksa hasil kerja staf;
 14. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada Bupati;
 15. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati;
 16. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar secara proporsional di setiap wilayah sehingga mampu mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: jalan, jembatan, irigasi, drainase, perumahan, pemukiman, tata ruang, energi listrik, serta fasilitas sosial ekonomi lainnya	1 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik termasuk transportasi, air bersih serta energi listrik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Regulasi mengenai kegiatan pertambangan bahan galian non logam/ batuan 2 Monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan bahan galian non logam /batuan 3 Meningkatnya penertiban kegiatan pertambangan rakyat 4 Tersedianya software untuk peningkatan sistem pengelolaan bidang pertambangan 5 Persentase ketersediaan data potensi sumber daya mineral, batuan, logam, ABT/AP dan sumur minyak serta tertibnya pendistribusian minyak dan gas 6 Jumlah perusahaan penambangan dan produksinya serta kontribusinya terhadap PAD sektor pertambangan umum 7 Ketersediaan penerangan listrik perkotaan dan perdesaan 8 Pendayagunaan energi baru dan terbarukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Guna terwujudnya tertib kegiatan pertambangan bahan galian non logam/batuan 2 Guna terwujudnya tertib kegiatan pertambangan bahan galian non logam/batuan 3 Guna terwujudnya kegiatan pertambangan yang tertib 4 Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pertambangan 5 Melaksanakan inventarisasi dan eksplorasi sumber daya mineral, batuan, ABT/AP dan sumur minyak serta melaksanakan inventarisasi dan eksplorasi sumber daya sumur minyak dan gas 6 Melaksanakan inventarisasi dan eksplorasi sumber daya mineral, batuan, ABT/AP dan sumur minyak 7 Untuk mewujudkan pemerataan penyaluran energi listrik 8 Untuk pengembangan PLTS dan PLTMH



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

1. Satuan Kerja : DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang perikanan dan peternakan.
3. Fungsi :
1. Merumuskan serta merangsang kebijaksanaan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas pokok Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Rokan Hulu;
 2. Memproses pemberian rekomendasi dan perizinan yang berkaitan dengan bidang perikanan dan peternakan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memberikan bimbingan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan peternakan;
 4. Melaksanakan pengumpulan data serta menyajikan sesuai dengan sifat dan keperluan;
 5. Menyusun rencana program kerja serta mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tersebut;
 6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan guna pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Koordinasi yang merupakan segala usaha mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain guna kelancaran tugas pokok Dinas Perikanan dan Peternakan.
 8. Adminstrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, perlengkapan, hukum dan keuangan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN
1 Mewujudkan berbagai jenis produk unggulan yang bisa menjadi ciri khas daerah terutama dari sektor-sektor yang memanfaatkan potensi lokal (<i>comparative advantage</i>) seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan	1 Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan	1 Konsumsi protein hewani asal ikan dan ternak 2 Produksi perikanan dan populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner 3 Peningkatan pendapatan petani 4 Peningkatan kelompok/ jumlah rumah tangga petani ikan dan peternak	1 Konsumsi protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat 2 Tercukupinya persediaan ikan dan ternak bagi masyarakat 3 Guna meningkatnya kesejahteraan petani ikan dan peternak 4 Guna meningkatkan hasil usaha/produksi perikanan dan peternakan
	2 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing	1 Peningkatan usaha-usaha agrobisnis dan agroindustri perikanan dan peternakan 2 Peningkatan Penerapan teknologi tepat guna di bidang perikanan dan peternakan 3 Terlindunginya kawasan konservasi perikanan di perairan umum dan pengembangan budidaya ternak lokal	1 Membantu/membina usaha-usaha agrobisnis dan agroindustri 2 Untuk meningkatkan hasil produksi perikanan dan peternakan 3 Terjaminnya kelangsungan hidup plasma nutfah komoditi perikanan dan peternakan

BUPATI ROKAN HULU, A

H. ACHMAD